

## BAB 5

### KESIMPULAN

Arus migrasi ke Jepang pada era globalisasi ini tidak dapat dihindarkan lagi. Para pekerja migran yang masuk ke Jepang bekerja di sektor pekerjaan kasar, atau pekerjaan 3K (*kitsui, kiken, kitanai*) yang tidak mampu diisi oleh tenaga kerja Jepang. Begitu pula dengan pekerja migran perempuan yang juga masuk ke Jepang pada awal tahun 1970. Pekerja migran perempuan ini berasal dari Asia Tenggara (Thailand dan Filipina) serta Asia Timur (Korea Selatan dan Taiwan)

Di antara pekerja migran perempuan yang masuk ke Jepang, terdapat hal yang berbeda yang terjadi pada pekerja migran perempuan Filipina yang masuk ke Jepang. Mayoritas dari pekerja migran perempuan Filipina ini masuk ke Jepang sebagai penghibur (*entertainer*) yang mengisi kekosongan pekerjaan di sektor hiburan (*entertainment*) di Jepang. Mereka datang ke Jepang menggunakan visa hiburan (*entertainment visa*). Dengan menggunakan visa ini, mereka seharusnya bekerja sebagai penyanyi, penari sebagai selayaknya penghibur (*entertainer*). Namun faktanya, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pelayan bar (*hostess*) di klub atau pub Filipina di Jepang.

Di sisi lain, di dunia ini sedang terjadi globalisasi yang mengakibatkan munculnya dua blok negara, yaitu negara Dunia Pertama (*First World*) dan negara Dunia Ketiga (*Third World*). Kedua negara ini menghasilkan dinamika yang disebut dengan dinamika globalisasi.

Berangkat dari teori yang dipaparkan oleh Parrenas mengenai proses makro globalisasi (*macroprocess of globalization*), maka salah satu aspek yang dari proses ini adalah timbulnya pembangunan wilayah yang tidak seimbang (*unequal development regions*) antara negara Dunia Pertama dan negara Dunia Ketiga. Jepang menjadi representasi dari negara Dunia Pertama dan Filipina menjadi representasi negara Dunia Ketiga. Pembangunan wilayah yang tidak seimbang ini dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain GDP (*Gross Domestic Product*), demografi dan HDI (*Human Development Index*). Hasilnya,

memang terjadi pembangunan wilayah yang tidak merata antara Jepang dan Filipina.

Pembangunan wilayah yang tidak merata ini berdampak pada adanya ketidak setaraan kekuasaan (*power inequalities*) pada dua negara. Konsekuensi dari posisi mereka yang tidak seimbang ini menghasilkan hubungan yang tidak seimbang. Faktanya, memang terdapat perbedaan kekuasaan antara pekerja migran perempuan Filipina yang bekerja di Jepang sebagai negara *host (employee)* dan orang yang mempekerjakan mereka (*employer*).

Sesuai dengan konsep eksklusi sosial yang dikemukakan oleh David Byrne, maka bentuk eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), akses untuk mendapat pekerjaan dan sumber penghasilan (*access to employment and material resources*), dan ketiadaan tempat tinggal yang layak (*a lack of decent housing*).

Dengan demikian, dengan menggunakan teori yang dipaparkan oleh Parrenas, dapat disimpulkan bahwa eksklusi sosial terhadap pekerja migran perempuan Filipina di Jepang terjadi akibat ketidak setaraan posisi yang muncul sebagai bentuk dari ketidak setaraan kekuasaan (*power inequalities*) antara pekerja migran perempuan Filipina (*employee*) dengan orang yang mempekerjakan mereka (*employer*) sebagai dampak dari adanya pembangunan wilayah yang tidak seimbang (*unequal development regions*) antara Jepang dengan Filipina.